

BAB II

PROFIL ANTI-SLAVERY DAN PROGRAM- PROGRAM ANTI-SLAVERY DI BERBAGAI NEGARA

Pada bab ini, penulis memfokuskan bahasan terkait konteks sejarah NGO *Anti-Slavery* di Inggris semenjak awal didirikannya NGO, visi dan misi dari NGO, tujuan dan strategi NGO dalam menangani suatu kasus, struktur organisasi NGO, dan program-program NGO di berbagai negara semenjak didirikannya NGO *Anti-Slavery* ini.

Non-Governmental Organization atau biasa disingkat NGO pada umumnya adalah organisasi yang berbasis nilai (*value-based organizations*) yang bergantung kepada pelayanan sukarela (*voluntary service*), bantuan amal (*charitable donations*) baik sebagian atau keseluruhan. Peranan NGO sendiri penting untuk pengembangan suatu negara dan masyarakat, karena NGO sendiri bisa berperan sebagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur, memfasilitasi komunikasi dari masyarakat ke pemerintah berupa apa yang dipikirkan, dirasakan dan yang ingin dilakukan oleh masyarakat. Bisa juga dari pemerintah ke masyarakat berupa apa yang akan direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. Dan yang paling sering dilakukan kebanyakan NGO adalah advokasi dengan masyarakat yang kurang mampu dari segi hal ekonomi maupun pendidikan, NGO akan melakukan mediasi dengan menjadi perwakilan dari masyarakat untuk pemerintah dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari melakukan aksi seperti unjuk rasa keikutsertaan dalam forum public untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi

kasus terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut sehingga menggiring opini publik hingga pemerintah merubah kebijakannya untuk membantu masyarakat tersebut.

Salah satu NGO di dunia adalah Anti-Slavery, Anti-Slavery adalah organisasi *human rights* tertua di dunia yang berbasis di Inggris, berdiri pada tahun 1839 oleh alibionis inggris bernama Thomas Clarkson. Anti-Slavery sendiri khususnya bekerja dalam bidang perbudakan. Anti-Slavery mengajak setiap orang untuk memberantas atau setidaknya mengurangi segala macam perbudakan di dunia. Dalam memberantas perbudakan, Anti-Slavery dan rekan-rekannya berusaha untuk mencari akar dari permasalahan segala macam perbudakan, termasuk pengucilan dari kekuasaan dan peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan - yang diabadikan oleh diskriminasi sosial dan sistem ketenagakerjaan informal dan genting serta masalah sistemik lainnya, seperti kurangnya lahan reformasi dan tidak memiliki tanah. Anti-Slavery berupaya mengubah struktur dan sistem kekuatan yang melanggengkan siklus perbudakan.

A. Sejarah Pembentukan Anti-Slavery

Anti-Slavery Society pertama kali didirikan pada tahun 1823 dan bersama-sama saling berkomitmen untuk menghilangkan perbudakan di Kerajaan Inggris yang akhirnya dicapai pada tahun 1838 dibawah ketentuan Undang-Undang Slavery Abolition Act no. 1833. Pada tanggal 17 April 1839, seorang aktivis yang berasal dari Inggris Joseph Sturge membentuk sebuah organisasi penerus bernama British and Foreign Anti-Slavery Society (yang sekarang dikenal kita sebagai Anti-Slavery), yang bekerja untuk mengilegalkan perbudakan di negara-negara di dunia.

Pada bulan Maret tahun 1839, sebuah surat kabar abolitionis New York menyerukan konvensi untuk menyatukan upaya pasukan Anti-Slavery internasional dari seluruh dunia, lalu pada musim panas 1840, British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS) menjawab panggilan itu, sehingga Pada tanggal 12 Juni hingga 23 Juni 1840, The world Anti-Slavery convention diselenggarakan di London yang bertempat di Freemasons Hall yang kemudian mendapatkan perhatian dari delegasi-delegasi yang ada di seluruh dunia, termasuk delegasi dari Bagian selatan dunia, Amerika Serikat yang mana istilah perbudakan disebut juga sebagai “our peculiar institution”. Kebanyakan delegasi-delegasi yang hadir adalah abolitionis terkemuka. Lebih dari 500 abolitionis dari Kanada ke Mauritius menghadiri pertemuan itu, dan ini menarik sekitar 1000 penonton setiap harinya. Dengan Thomas Clarkson sebagai pembicara utama dimana pertemuan tersebut diabadikan sebagai lukisan yang sampai sekarang lukisan tersebut dipajang di The National Portrait Gallery di London. Konvensi ini dipersatukan oleh tujuan yang sama yaitu untuk mengakhiri perbudakan di masa mereka. Para abolitionis Inggris ini bersemangat ingin menghentikan perbudakan manusia dan secara khusus percaya bahwa Inggris pada ambang decade baru dipersiapkan untuk memimpin serangan terhadap perbudakan di seluruh dunia, yang membuat para abolitionis ini yakin adalah karena telah dihapuskannya hukum perbudakan di Hindia Barat Inggris pada tahun 1839. Banyak dari abolitionis ini juga menempuh pendidikan dalam bidang perbudakan, seorang professor dari Universitas Harvard termasuk di antara pembicara utama, dan para hadirin di konvensi mendengar informasi yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan bentuk-bentuk perbudakan. Laporan dan informasi ini meneliti berbagai

topik yang menarik mulai dari perbudakan di Rusia dan penjajahan Liberia hingga perbudakan di Amerika Serikat dan Hindia Inggris. Beberapa mata kuliah bahkan berisi contoh-contoh awal tentang sejarah perbudakan. Salah satu kontribusi paling berharga yang dibuat oleh konvensi adalah pengumpulan dan publikasi pemeriksaan paling komprehensif tentang perbudakan dan perdagangan budak hingga saat ini. Setelah pertemuan ini, BFASS memantapkan dirinya sebagai clearinghouse internasional untuk informasi dan beasiswa terbaik tentang perbudakan dan perdagangan budak.

Anti-Slavery Convention menghasilkan banyak sekali informasi mengenai perbudakan yang nantinya digunakan oleh para alibisionis seperti William Lloyd Garrison, Joseph Pease, dan William Adam. Dan walaupun Konvensi ini juga menggambarkan beberapa perpecahan yang dapat timbul di dalam gerakan-gerakan abolisionis, Konvensi Anti-Slavery memang menyoroti satu kenyataan yang keras dan universal: bahkan setelah penghapusan hukum oleh Inggris, perbudakan terus memengaruhi setiap sudut dunia. Dari ladang kapas India hingga fazenda Brasil, perbudakan adalah masalah global. Meskipun kaum abolisionis tidak setuju dengan berbagai pendekatan untuk mengakhirinya, mereka mengakui bahwa perbudakan, tidak peduli bentuknya, adalah dosa universal terhadap kemanusiaan, yang hanya dapat diperbaiki melalui emansipasi global. Hari ini, pertempuran yang mereka ikuti pada tahun 1840 berlanjut. BFASS hidup dengan nama Anti-Slavery Internasional.. (II, n.d.)

B. Tujuan dan Tugas Anti-Slavery

Visi dari Anti-Slavery sendiri adalah “*a world free from slavery*” yang berarti dimana anti-slavery menginginkan dunia ini untuk bebas dari segala macam perbudakan yang ada. Anti-Slavery menangani akar dari segala penyebab perbudakan yang ada, dan konsekuensinya untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Untuk mengakhiri perbudakan, Anti-Slavery menangani perbudakan dari banyak sudut, di satu sisi, Anti-Slavery meningkatkan kesadaran akan pentingnya untuk menghapuskan perbudakan di dunia, Anti-Slavery juga melakukan kampanye, dan Anti-Slavery terlibat langsung dengan pemerintah dan organisasi internasional. Di sisi lain, Anti-Slavery bekerja dalam kemitraan dan organisasi lokal, dimana hal ini penting untuk memahami konteks local dan pendekatan khusus yang diperlukan untuk mencapai perubahan berkelanjutan bagi para korban perbudakan. Bersama dengan para mitra lokal, Anti-Slavery mendukung individu dan masyarakat yang menjadi korban perbudakan dan juga memfasilitasi akses ke pendidikan, keadilan, dan kompensasi bagi orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan.

Misi dari Anti-Slavery adalah untuk bekerja secara langsung dan tidak langsung dengan para generasi-generasi dan pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga tingkat internasional untuk memberantas perbudakan dan penyebab dari perbudakan yang ada di dunia. (Anti-Slavery, Vision, mission and strategy). Dalam bekerja, Anti Slavery sendiri memiliki 6 nilai-nilai moral terhadap apa yang mereka lakukan, baik secara internal maupun eksternal, adapun nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Transformative:** Dimana Anti-Slavery bekerja di semua tingkatan untuk perubahan jangka panjang, berkelanjutan, sistemik, struktur kekuatan yang menantang, bertahan hingga tujuan kami tercapai.
2. **Authoritative:** Anti-Slavery adalah organisasi yang berpengetahuan luas dan andal yang posisinya dikembangkan melalui kerja berkelanjutan berbasis hak asasi manusia dengan masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak, dan melalui penelitian yang kuat dan berbasis bukti.
3. **Ethical:** Anti-Slavery adalah organisasi independen yang keputusan, tindakan, dan posisinya diambil dari pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mendorong perubahan sosial yang ditargetkan, diterapkan secara konsisten dan tidak dibentuk oleh kepentingan pribadi seperti pemerintah atau perusahaan.
4. **Equitable:** Anti-Slavery berkomitmen terhadap keadilan, non-diskriminasi, dan saling menghormati, baik secara internal maupun eksternal, dalam semua keputusan dan tindakan kita, dan pemenuhan yang tidak memihak atas hak asasi dan martabat setiap orang, termasuk di mana hal ini mungkin melibatkan tindakan afirmatif yang menguntungkan mereka yang kurang beruntung. individu dan kelompok.
5. **Accountable:** Anti-Slavery bertanggung jawab kepada berbagai kelompok dan individu, baik secara internal maupun eksternal, untuk integritas tindakan

dan keputusan kami, yang ditunjukkan melalui budaya keterbukaan dan transparansi yang proaktif.

6. **Collaborative:** Anti-Slavery diperkuat dengan bekerja bersama, melalui kolaborasi dan konsultasi partisipatif yang penuh hormat, mengidentifikasi secara proaktif dan melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan. (Anti-Slavery, Our values, n.d.)

Anti-Slavery percaya dunia akan bisa terbebas dari perbudakan, hal ini akan terjadi ketika aktifitas ‘top-down’ dan ‘bottom-up’ bertepatan – ketika orang-orang yang termasuk dalam praktik perbudakan dan para komunitasnya menjadi diberdayakan untuk menegaskan dan mengklaim hak mereka atas kebebasan, keadilan, dan sumber daya, juga ketika institusi local, komunitas dan mereka yang mendapatkan manfaat dari perbudakan mengadopsi norma-norma social baru untuk menolak perbudakan, dan ketika pemerintah memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat untuk melindungi orang-orang dari perbudakan dan menerapkan undang-undang dan kebijakan tersebut melalui praktik yang kuat.

1) Upaya Anti-Slavery menghapuskan praktik perbudakan

- a) Senegal, anak-anak di 'daara' yang dimodernisasi, tempat anak-anak tidak dipaksa untuk mengemis. Sebagai organisasi hak asasi manusia tertua di dunia, pekerjaan

- b) Sejak 1839, Anti-Slavery telah mengembangkan reputasi yang kuat dalam memajukan agenda politik tentang perbudakan melalui penelitian, advokasi, kampanye, dan bekerja dengan komunitas lokal yang mutakhir.
 - c) Anti-Slavery terlibat dalam mengakhiri berbagai manifestasi perbudakan di banyak penjuru dunia, termasuk perbudakan di koloni-koloni Inggris, pelanggaran di Kongo Belgia, sistem Indian kuli 'dan perbudakan di Amazon Peru.
 - d) Anti-Slavery terlibat dalam pengembangan semua undang-undang utama menentang perbudakan, termasuk Konvensi Perbudakan PBB 1926 dan 1956 dan sejumlah undang-undang lainnya seperti konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang pekerja paksa dan pekerja anak dan konvensi perdagangan manusia Dewan Eropa. Semua undang-undang ini menempatkan perbudakan dalam kerangka hukum saat ini. Karena ditempatkan secara unik untuk mengidentifikasi, Anti-Slavery memahami dan menangani bentuk perbudakan modern, Anti-Slavery membawa keahliannya ke abad ke-21. Perbudakan adalah masalah yang kompleks dan terus berubah dimana hal ini membutuhkan solusi yang semakin kompleks untuk mengatasinya.
- 2) Metode Anti-Slavery untuk mengakhiri perbudakan:**

Tugas Anti-Slavery untuk mengakhiri perbudakan didefinisikan dalam teori Anti-Slavery tentang perubahan yang dinamakan 'Theory of

Change'. Dan membayangkan bekerja di tingkat structural dan tingkat akar rumput untuk mengubah kebijakan dan praktik, untuk mendorong perubahan perilaku dan menciptakan norma-norma social baru untuk memungkinkan orang-orang yang dilecehkan dan dieksploitasi untuk dapat mengklaim hak asasi mereka.

Selama tahun 2017, hingga 2018 tahun terakhir, Anti-Slavery bekerja untuk memperkuat ke 17 mitra-mitra dari anti-slavery di luar negeri dan untuk secara langsung melibatkan dan mendukung 77.388 orang dari kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung di 19 proyek di 14 negara untuk memahami, menegaskan, dan mengklaim hak-hak mereka. Anti-Slavery menggunakan metode berikut:

- a) Memungkinkan orang-orang untuk meninggalkan perbudakan melalui frontline work. Anti-Slavery bekerja sama dengan mitra lokal untuk menjangkau orang-orang yang paling rentan terhadap perbudakan dan eksploitasi. Misalnya, mitra local Anti-Slavery di India mengoperasikan 24 hotline untuk memungkinkan orang menelpon dan meminta bantuan. Kasus-kasus hukum telah diajukan dan dengan bantuan kepada pihak yang berwenang, orang-orang yang berada di Brick Kiln yang terjat hutang telah diselamatkan.
- b) Membantu korban perbudakan dengan frontline work, dimana memastikan mereka dapat mengakses dukungan psikologis dan hukum yang mereka butuhkan untuk memulihkan dan

mendapatkan keadilan dan kompensasi. Misalnya, di Mauritania, bersama mitra local anti-slavery membantu orang-orang melarikan diri dari perbudakan dan membangun kembali kehidupan mereka sebagai orang-orang bebas dengan memberikan dukungan keuangan, tempat tinggal, dan pelatihan kejuruan.

- c) Mendukung masyarakat agar lebih terlindungi dari praktik perbudakan dengan membantu menuntut hak asasi mereka dan mengatasi akar penyebab perbudakan melalui akses ke pendidikan dan penghapusan ketidakseimbangan kasta dan gender. Sebagai contoh, kami mendirikan enam komunitas bekas budak di Niger, memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak mereka.
- d) Mengadvokasi dan melobi negara-negara untuk legislasi, kebijakan, dan praktik untuk mengakhiri dan mencegah perbudakan. Sebagai contoh, kami mendesak pemerintah Senegal untuk berkomitmen untuk mengakhiri anak yang dipaksa mengemis dan mereformasi sekolah-sekolah agama di negara itu.
- e) Kerja dan kampanye kebijakan internasional - melobi dan meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Uni Afrika dan Organisasi Buruh Internasional, serta bisnis dan organisasi lainnya. Misalnya, kami adalah orang pertama yang mengidentifikasi perbudakan sebagai masalah pembangunan

prioritas dan panggilan untuk memasukkan pemberantasan perbudakan untuk dijadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca-2015.

- f) Mengumpulkan informasi dan menerbitkan laporan tentang pelanggaran HAM ini, membawanya ke perhatian publik dan mempromosikan aksi publik untuk mengakhirinya melalui kerja media dan kampanye pendukung. Misalnya, Anti-Slavery mengungkap masalah kerja paksa migran di Timur Tengah dan memprakarsai investigasi Guardian terhadap pelanggaran perbudakan di Qatar menjelang Piala Dunia FIFA.

C. Usaha Anti-Slavery Dalam Penegakan Keadilan Dan Pemulihan Bagi Kasus Perbudakan Di Berbagai Negara

Sejak dibentuk dari tahun 1838 hingga sekarang (2019), Anti-Slavery sudah melakukan berbagai usaha dalam membantu korban perbudakan yang dilaporkan dalam laporan tahunan Anti-Slavery. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada satu negara atau isu tertentu saja, namun sangat beragam mulai dari masalah perdagangan manusia, perbudakan anak, jeratan hutang, dan bahkan kerja paksa. Tak jarang isu yang serupa terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda sehingga program yang dilaksanakan melingkupi wilayah-wilayah tersebut. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kerjasama dan penguatan jaringan Anti-Slavery di dunia.

1. Pada tahun 1850, Anti-Slavery mengembakan kelompok aksi ‘slave-free produce’ yang mempromosikan alternative untuk budak perkebunan gula.

2. Pada tahun 1890, Anti-Slavery membantu mendirikan Brussels Act, perjanjian anti-slavery pertama yang komprehensif dimana perjanjian ini memungkinkan inspeksi kapal dan penangkapan bagi siapapun yang mengangkut budak.

3. Pada tahun 1904-1913, Anti-Slavery berkampanye menentang praktik perbudakan yang dilakukan di Free State Congo oleh King Leopold II dari Belgia. Kampanye ini yang akhirnya membantu mengakhiri tirani King Leopold II. Tirani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti; negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya (KEMDIKBUD, n.d.) Tirani King Leopold II bagi Free State Congo adalah kisah tragis dengan jumlah korban setara dengan Hitler, namun banyak orang yang belum mengetahuinya. King Leopold mengubah Free State Congo menjadi tempat kerja paksa besar-besaran, ia membuat kekayaan untuk dirinya sendiri dari hasil panen karet, dan ia berkontribusi besar dalam kematian 10 juta jiwa orang yang tak bersalah. Raja Leopold II dari Belgia ini dikenang dalam sejarah sebagai monster. Kekejamannya di Kongo yang dilakukan atas nama keserakahan adalah bab paling gelap dari kolonialisme Eropa. Selama periode dari tahun 1880-an hingga 1920-an jutaan orang Afrika terbunuh dalam pengejaran keuntungan untuk Leopold sendiri. Namun, selama sebagian besar waktu ini, sebagian besar dunia mengaguminya karena apa yang mereka anggap sebagai misinya yang mulia dan “beradab” di Afrika. Viscount Ferdinand de Lesseps,

yang membangun Terusan Suez, menyebut Leopold "kemanusiaan terbesar" pada masanya. Baru menjelang akhir kehidupan Leopold, dunia mulai memperhatikan sifat sebenarnya dari kegiatannya di Kongo.

4. Pada Tahun 1920, Anti-Slavery membantu mengakhiri system kerja kontrak di koloni Inggris setelah berkampanye menentang penggunaan "kuli" di India dan Cina.
5. Pada tahun 1921, Anti-Slavery melakukan peranan yang penting dalam mengakhiri kegiatan yang menggunakan tenaga kerja dari budak pribumi dalam memproduksi karet di Perusahaan Amazon, Peru.
6. Pada tahun 1926, Berhasil melobi untuk penyelidikan League of Nations tentang perbudakan, yang menghasilkan Konvensi Perbudakan tahun 1926 yang mewajibkan semua negara yang meratifikasi untuk mengakhiri perbudakan.
7. Pada Tahun 1956, Anti-Slavery mempengaruhi konten dari konvensi tambahan mengenai Penghapusan perbudakan.
8. Pada tahun 1984, Anti-Slavery membantu pembentukan dana HAM untuk masyarakat pribumi.
9. Pada tahun 1995, Anti-Slavery mendukung LSM di India untuk pendirian Rugmark Foundation
10. Pada tahun 1994, Anti-Slavery menjadi supporter utama dari LSM End Child Prostitution, Pornography

and Trafficking campaign (ECPAT) dan membantu mendirikan cabang ECPAT di Inggris.

11. Pada tahun 1998, Anti-Slavery menjadi salah satu penyelenggara Global March 1998 untuk melawan eksploitasi Pekerja Anak, dan pada akhirnya membantu mengadopsi Konvensi ILO yang baru mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, (Worst Forms of Child Labour), 1999 (No. 182). (anti-slavery, n.d.)
12. Pada tahun 2000, Anti-Slavery berhasil mengkampanyekan penghapusan praktik perburuan terikat di Nepal.
13. Pada tahun 2003, Anti-Slavery melakukan survei yang mengarah pada kriminalisasi perbudakan di Niger dengan LSM Lokal Timidria. Dan di tahun yang sama Anti-Slavery Melobi pemerintah Brasil untuk memperkenalkan National Plan untuk Pemberantasan Perbudakan.
14. Pada tahun 2004, Anti-Slavery berhasil melobi untuk menjadikan perdagangan eksploitasi seksual dan tenaga kerja sebagai pelanggaran pidana di negara Inggris
15. Pada tahun 2005, Anti-Slavery Mengorganisir kampanye besar yang mengakibatkan Uni Emirat Arab membebaskan lebih dari 3.000 anak yang diperdagangkan untuk digunakan sebagai joki unta. Diikuti dengan negara UEA, Qatar dan Kuwait yang juga turut menghapuskan praktik tersebut. Pada tahun yang sama juga, Anti-Slavery Mempengaruhi

perkembangan Konvensi Dewan Eropa terhadap perdagangan manusia, yang merupakan standar internasional pertama untuk menjamin orang-orang yang diperdagangkan standar minimum perlindungan dan dukungan. Konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah Inggris pada akhir 2008.

16. Pada tahun 2007, Anti-Slavery membantu mendorong penunjukan Pelapor Khusus PBB untuk Contemporary Forms of Slavery (bentuk-bentuk perbudakan kontemporer). Dan pada tahun yang sama, anti-slavery juga berhasil berkampanye untuk mengkriminalisasi perbudakan di Mauritania.
17. Pada tahun 2008, Badan PBB menciptakan Pelapor Khusus untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer. Mereka akan melaporkan langsung ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi praktik perbudakan di negara mereka masing-masing. Ini adalah mekanisme baru PBB tentang perbudakan dalam lebih dari 30 tahun. Dan pada tahun yang sama juga, Anti-Slavery mendukung mantan budak, Hadijatou Mani di pengadilan internasional ECOWAS (Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) yang menyatakan bahwa negara Niger bersalah karena gagal melindunginya dari perbudakan. Putusan itu menetapkan preseden hukum bagi Niger dan semua negara ECOWAS lainnya untuk melindungi orang dari perbudakan.
18. Pada tahun 2011, Anti-Slavery mengadakan Kampanye Home Alone yang berperan besar dalam

membujuk Organisasi Buruh Internasional untuk mengadopsi pada Juni 2011, yang mengamankan hak-hak jutaan pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Dan pada tahun yang sama juga berhasil mengkampanyekan untuk memaksa pemerintah Inggris untuk menandatangani undang-undang anti-perdagangan UE yang baru, memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan keadilan bagi para korban perdagangan manusia.